

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program pembangunan menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kesejahteraan umum, yaitu terkait dengan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah atau negara. Pembangunan ini tentunya harus dilakukan secara merata, baik pembangunan desa maupun pembangunan di wilayah Kota. Di Indonesia sendiri kenyataannya pembangunan desa belum mengalami pemekaran, dibandingkan dengan wilayah kota. Kegiatan pembangunan tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada Maret 2023, total penduduk yang tergolong dalam kategori miskin mencapai 25,90 juta jiwa, dengan persentase 7,29 persen adalah penduduk miskin perkotaan, dan persentase penduduk miskin perdesaan adalah sebesar 12,22 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa ternyata masih tingginya jumlah penduduk Indonesia yang belum terbebas dari kemiskinan, yang menunjukkan bahwa pembangunan desa belum berdampak optimal pada kesejahteraan masyarakat desa. Tingkat kemiskinan yang tinggi di desa dapat diketahui masih terdapat kesenjangan antara masyarakat desa serta masyarakat kota sehingga harus segera diatasi. Bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan melakukan program pembangunan nasional.

Pembangunan nasional selaras dengan berbagai tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu kesepakatan global yang disetujui berbagai negara dunia, salah satunya adalah Indonesia, untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat secara adil dan berkelanjutan. SDGs ditetapkan pada Sidang Umum PBB bulan September tahun 2015 dan mencakup 17 tujuan utama yang ditargetkan tercapai pada tahun 2030. Tujuan-tujuan tersebut mencakup berbagai aspek penting kehidupan, mulai dari pengentasan masalah kemiskinan sebagai tujuan 1, penghapusan masalah kekurangan pangan sebagai tujuan 2, Kesehatan, kesejahteraan sebagai tujuan 3, Tingkat pendidikan yang berkualitas sebagai tujuan 4, hingga kesamaan gender sebagai tujuan ke-5. SDGs juga mencakup akses terhadap kualitas air bersih dan energi sebagai tujuan 6 dan 7, pekerjaan yang layak dan peningkatan ekonomi sebagai tujuan 8, pembangunan inovasi dan industri sebagai tujuan 9, penurunan tingkat kesenjangan sebagai tujuan 10, serta pembangunan perkotaan dan komunitas yang berkelanjutan sebagai tujuan 11. Selain itu, terdapat tujuan yang berfokus pada kegiatan konsumsi dan kegiatan produksi yang bertanggung jawab sebagai tujuan 12, pengelolaan perubahan iklim sebagai tujuan 13, pelestarian lingkungan laut dan darat sebagai tujuan 14 dan juga 15, perdamaian serta keadilan sebagai tujuan 16, serta kemitraan global untuk pencapaian tujuan-tujuan tersebut sebagai tujuan 17. Secara keseluruhan, SDGs menjadi kerangka kerja bersama dalam mendorong perubahan positif yang inklusif, menyeluruh, dan memiliki berkelanjutan di tingkat nasional maupun global.

Pembangunan nasional ini dilakukan bersama masyarakat serta pemerintah, dalam mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional ini tentunya harus dimulai pada tingkat desa. Pembangunan wilayah desa memberikan peran yang penting untuk mendorong tercapainya *Sustainable Development Goals* (SDGs) karena wilayah desa adalah unit terkecil sistem pemerintahan dan langsung

bersentuhan oleh masyarakat. Berdasarkan data Kemendesa tahun 2021 tingkat kontribusi desa sebesar 74%, dalam pencapaian SDGs nasional. Oleh sebab itu pembangunan desa menjadi kunci penting dalam mendorong pembangunan nasional berkelanjutan.

Pembangunan desa sangat relevan dengan pencapaian SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan) serta tujuan ke-8 (lapangan kerja layak serta peningkatan ekonomi). Kedua tujuan ini menjadi pondasi utama dalam upaya mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Melalui pembangunan desa yang terarah dan berbasis kapasitas lokal, contohnya pada pengembangan sektor pertanian, perikanan, UMKM, serta desa wisata, masyarakat desa memiliki lebih banyak peluang untuk bekerja, berwirausaha, serta meningkatkan pendapatan keluarga. Dana desa yang dialokasikan setiap tahun juga menjadi instrumen penting dalam mendukung kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta memperkuat infrastruktur pendukung kegiatan produktif. Melalui penciptaan lapangan kerja di desa, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan mengurangi ketergantungan terhadap kota, pembangunan desa secara langsung berkontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan wilayah, keberhasilan pembangunan desa menjadi kunci strategis dalam mewujudkan sasaran pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam menghapus kemiskinan dan menciptakan peningkatan ekonomi yang lebih menyeluruh untuk berbagai golongan masyarakat, sesuai dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Pemerintah negara Indonesia sendiri sudah mengeluarkan kebijakan terkait dengan pemerintah desa sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang desa, menegaskan bahwa Desa mempunyai hak asal usul serta hak tradisional dalam mengatur dan mengelola keperluan masyarakat lokal. Desa juga memiliki fungsi untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU ini juga dijelaskan bahwa pembangunan desa dapat menjadi usaha meningkatkan kualitas hidup, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Undang – Undang No 6 Tahun 2014, menandai perubahan besar pengaturan desa. Desa tidak hanya dijadikan untuk objek pembangunan, namun juga subjek dan motor penggerak krusial dalam mendorong kesejahteraan warga masyarakat desa. Program pembangunan desa ini juga didukung sejak pemerintahan Presiden dan wakil presiden tahun 2015 – 2019. Dalam 9 prioritas program pembangunan lima tahun kedepan, atau program pembangunan Nawacita yang ketiga, yaitu pembangunan negara Indonesia dimulai pada wilayah pinggiran, melalui penguatan daerah-daerah serta desa. Hal ini memperlihatkan pembangunan bukan hanya berfokus pada daerah perkotaan saja, tetapi dilakukan secara keseluruhan pelosok Indonesia.

Bentuk pembangunan desa bukan hanya dilakukan melalui pembangunan secara fisik, tidak hanya infrastruktur, tetapi juga bagaimana pembangunan desa ini dapat menciptakan kemandirian pada desa tersebut, desa mandiri ini dapat dilihat pada adanya akses terhadap pelayanan dasar yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Pemenuhan pelayanan dasar ini juga sangat berkaitan dengan kemandirian perekonomian. Untuk mendukung perekonomian desa ini pemerintah

sudah memberikan dana yang APBN, dalam bentuk pemberian dana pemerintah desa. Prioritas dana desa ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 7 Tahun 2021, untuk peningkatan infrastruktur yang mengedepankan penggunaan tenaga kerja, dan bahan baku asli desa, Dana desa tentunya harus digunakan dalam pengembangan desa, melalui pemberdayaan masyarakat dengan melihat potensi dan karakteristik desa. Pemberdayaan masyarakat desa ini juga berpengaruh terhadap kemandirian suatu desa. Klasifikasi perkembangan kemandirian desa dapat dinilai melalui Indeks Membangun Desa (IDM), yang nantinya akan menentukan sebuah desa masuk dalam pengelompokan status desa ke dalam kategori mandiri, maju, berkembang, tertinggal, serta sangat tertinggal.

Sebuah desa dikatakan mandiri adalah dapat menyelenggarakan pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan masyarakat desa, baik berupa ketahanan sosial ekonomi, ekologi secara berkelanjutan, sedangkan desa dikatakan sebagai sebuah desa yang maju, jika desa dapat mencapai ketahanan sosial, ekonomi, ekologi yang relatif kuat, namun masih memerlukan adanya peningkatan lagi untuk mencapai desa mandiri, sedangkan desa berkembang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, ekologi yang sedang berkembang,. Sementara desa tertinggal menunjukkan lemahnya ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. dan desa sangat tertinggal tingkat ketahanan sosial, ekonomi,serta tingkat ketahanan ekologi yang masih sangat lemah, dan harus terus ditingkatkan untuk mencapai status desa tertinggal. Menurut data Kementerian Desa, Pemberdayaan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, jumlah desa yang

mencapai kemandirian masih sedikit daripada jumlah desa dalam klasifikasi desa berkembang, seperti pada data berikut:

Tabel 1. 1 Klasifikasi Desa Indonesia 2023



Sumber: kanaldesa.com

Mengacu pada indeks desa yang disusun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), pengukuran tingkat kemandirian desa dilakukan melalui tiga dimensi utama yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga diperoleh tingginya desa belum berstatus mandiri pada tahun 2023. Data diatas menunjukkan bahwa jumlah desa berkembang adalah yang paling tinggi, dengan jumlah desa sebanyak 28,749 desa. Hal ini menunjukkan bahwa desa berkembang harus terus digali potensinya agar nantinya dapat mewujudkan kemajuan dan kemandirian desa Potensi desa ini merupakan keseluruhan kekayaan sumber daya alam dan kualitas SDM desa, baik yang sudah digunakan ataupun belum dimanfaatkan, baik itu potensi bersifat material dan nonmaterial, terdiri atas komponen tanah, air, sumber daya manusia, kondisi iklim, dan cuaca aktivitas pertanian, serta sumber daya alam yang dihasilkan, sedangkan potensi non fisik ini berkaitan dengan sosial dan budaya

dalam suatu wilayah desa tersebut. Dari kedua jenis potensi ini dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian warga desa, selain dari dana desa, dengan mengembangkan desa melalui sektor pariwisata. Sektor pariwisata ini nantinya dapat kembangkan dan digali potensinya dalam meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Desa.

Potensi pariwisata ini tentunya adalah salah satu upaya pemerintah desa untuk mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat desa, sehingga pemerintah desa diharapkan dapat mengelola dan mengembangkan seluruh potensi yang tersedia dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber peningkatan perekonomian masyarakat. Potensi desa dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk berlibur ke desa, baik wisata alam, ataupun wisata yang berkaitan dengan adat budaya suatu desa. Hal ini dapat dikembangkan melalui program desa wisata, sebagai bentuk penerapan pengembangan pariwisata berbasis pada potensi lokal pedesaan. Hal ini karena umumnya desa wisata memiliki keberagaman produk wisata, seperti budaya kehidupan masyarakat desa sehari-hari, keindahan alam, ataupun kesenian kreatif desa, oleh sebab itu penting untuk mengembangkan desa wisata, sebagai bentuk peningkatan perekonomian masyarakat desa, melestarikan tradisi desa, meningkatkan pertumbuhan industri kecil menengah, dan memperkenalkan produk lokal untuk meningkatkan penjualan.

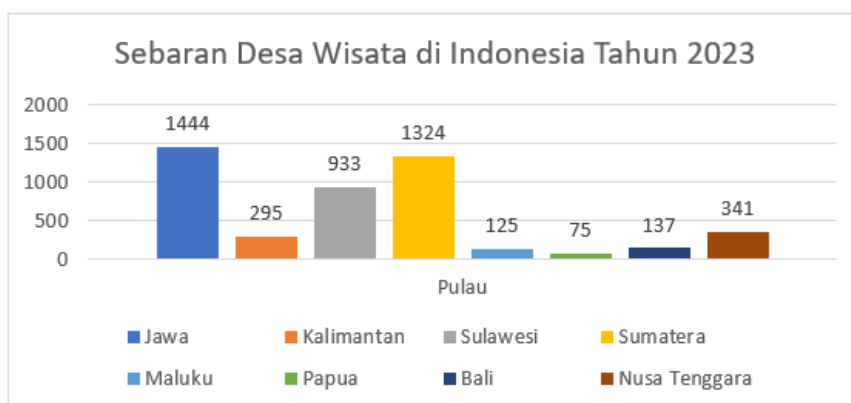
Potensi yang ada desa wisata ini tentunya perlu dieksplor agar nantinya, dapat dimanfaatkan bagi warga desa untuk dikembangkan dan mendapat keuntungan dari kunjungan wisata ke desa. Sebelum menjadi desa wisata, tentunya sebuah desa harus melakukan proses penetapan desa wisata. Hal ini dimulai melalui tahap

pengusulan hingga proses penetapan status desa wisata yang diinisiasi oleh kelompok masyarakat kemudian diajukan kepada pemerintah desa yang berwenang, untuk nantinya disepakati bersama berdasarkan proses musyawarah. Setelah proses penetapan kemudian hasil Keputusan musyawarah, akan disampaikan kepada pengembang desa wisata melalui Organisasi perangkat daerah yang mengelola urusan terkait dengan kepariwisataan. Kemudian Organisasi perangkat daerah akan melakukan verifikasi, uji kelayakan, sesuai persyaratan yang telah ditentukan, jika calon desa wisata ini lolos maka selanjutnya akan dikeluarkan penetapan, melalui Keputusan bupati/walikota. Dalam proses pengajuan desa sebagai desa wisata tentunya terdapat kelompok atau pihak yang akan mengakomodir pengelolaan desa wisata kedepannya, sehingga diperlukan adanya peran kelembagaan dalam proses pengelolaan desa wisata. Peran lembaga tersebut adalah untuk mengelola sumberdaya serta pendistribusian manfaat untuk meningkatkan potensi pariwisata. Keberhasilan desa wisata dalam pengelolaan potensi kepariwisataan, nantinya dapat dilihat melalui klasifikasi desa wisata yaitu, desa rintisan, desa berkembang, desa maju, serta desa wisata mandiri. Penetapan klasifikasi desa wisata ini dilakukan oleh perangkat desa bidang pariwisata, serta organisasi perangkat daerah bidang pemberdayaan pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat desa.

Program desa wisata di Indonesia memiliki landasan hukum formal, baik di tingkat nasional maupun daerah. Secara umum, Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjadi dasar utama, menegaskan bahwa desa wisata adalah bagian dari destinasi wisata yang dikelola berkelanjutan serta melibatkan

partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menggali dan mengembangkan potensi lokal, termasuk sektor pariwisata sebagai bagian dari pembangunan ekonomi desa. Dalam hal pendanaan desa wisata juga diatur oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. No 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 menegaskan dana desa dapat dipergunakan untuk mendukung pengembangan desa wisata sebagai upaya transformasi ekonomi desa. Di Indonesia sendiri pada tahun 2023, berdasarkan data Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif, terdapat 4.674 desa wisata, jumlah ini meningkat dari tahun 2022 dengan jumlah sebesar 3.419 desa wisata dengan persebaran sebagai berikut:

Tabel 1. 2 sebaran desa wisata Tahun 2023



Sumber: Fortune Indonesia

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui persebaran desa wisata, banyak ditemukan pada wilayah pulau Jawa, dan persebaran desa wisata yang paling rendah adalah di pulau Papua. Jawa Tengah adalah salah satu provinsi dengan keanekaragaman budaya, serta berbagai keindahan alam. begitu juga potensi desa wisata di Jawa

Tengah yang dapat dijadikan sebagai destinasi pariwisata alternatif untuk menarik wisatawan. Berdasarkan data dari Jejaring Desa Wisata tahun 2024 (Jadesta) Provinsi Jawa Tengah, Jawa Tengah memiliki 511 desa wisata. Salah satu kabupaten di Jawa Tengah dengan potensi desa wisata adalah, Kabupaten Semarang, yang letaknya berbatasan langsung dengan Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah. Jumlah desa wisata di Kabupaten Semarang yang tercatat pada jejaring Desa Wisata sebanyak 26 desa wisata dengan klasifikasi kemajuan desa wisata sebagai berikut:

No.	Nama Desa Wisata	Klasifikasi Desa	No.	Nama Desa Wisata	Klasifikasi Desa
1.	Agropark & RC	Rintisan	14.	Kelen Lepen Asri 07	Rintisan
2.	Branjang	Rintisan	15.	Kenteng	Rintisan
3.	Curug Sewu	Rintisan	16.	Kreatif Perdamaian Srubung Gunung	Rintisan
4.	Curung Grenjeng	Rintisan	17.	Lembah Kendalisodo	Berkembang
5.	Curug Kembar Baladewa	Rintisan	18.	Lerep	Maju
6.	Desa Wisata Kedunggondang	Rintisan	19.	Menari Tanon	Rintisan
7.	Desa Wisata Tegalwaton	Rintisan	20.	Ngidam Mancur	Rintisan
8.	Gedangan	Rintisan	21.	Nyatnyono	Rintisan
9.	Gemawang	Rintisan	22.	Sambirejo	Rintisan
10.	Gili Pesona	Rintisan	23.	Samirono	Rintisan
11.	Kalongan	Rintisan	24.	Sitarung Desa Kemambang	Rintisan
12.	Kampung Jajar	Rintisan	25.	Wisata Alam Desa Wirogomo	Rintisan
13.	Kampung Susu Sumogawe	Maju	26.	Rowoboni	Rintisan

Gambar 1. 1 klasifikasi desa wisata kabupaten Semarang tahun 2024

Sumber: jadesta.kemenparekraf.2024

Data Jejaring Desa Wisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdapat sebanyak 23 dari 26 desa wisata di Kabupaten Semarang masih dalam klasifikasi desa Rintisan, penetapan desa wisata rintisan ini didapatkan jika terdapat kriteria antara lain, desa wisata masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi potensi wisata, karena masyarakat masih belum menyadari akan

potensi desanya, pengembangan sarana prasarana masih terbatas, rendahnya tingkat kunjungan wisatawan yang umumnya berasal dari wilayah sekitar desa. Dari data di atas juga ditemukan bahwa terdapat 1 desa yang statusnya berkembang, yaitu Desa Lembah Kendalisodo, dengan kriteria antara lain, semakin dikenal oleh masyarakat lokal serta dikunjungi wisatawan dari luar wilayah, yang diikuti dengan adanya peningkatan dan pengembangan infrastruktur wisata, adanya lapangan pekerjaan serta adanya kegiatan perekonomian untuk masyarakat.

Dari 26 desa wisata yang tercatat pada gambar 1.1 dapat diketahui bahwa terdapat 2 desa wisata yang sudah masuk dalam kategori desa wisata maju, yaitu Desa Kampung Susu Sumogawe dan Desa Lerep, kedua desa wisata ini dikatakan sebagai desa wisata yang maju karena, masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi desa, pengembangan, dan pengelolaan, yang dimanfaatkan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan asli desa. Kampung susu sumogawe, berfokus pada pengembangan wisata berbasis peternakan dan olahan susu sebagai desa penghasil susu, seperti pembuatan sabun susu, permen susu, yogurt dan olahan susu lain yang diproduksi secara rumahan oleh masyarakat desa. Keberhasilan kampung susu sumogawe dalam mengembangkan potensi wisata ini juga dapat dilihat pada alokasi dana dari pemerintah provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020, sejumlah Rp1 Miliar untuk membeli dua unit mobil shuttle, membangun rest area, gazebo, patung sapi, dan tempat parkir untuk memberikan pelayanan kepada pengunjung kampung susu sumogawe.



Gambar 1. 2 fasilitas desa wisata kampung susu sumogawe

Sumber: antarateng

sementara desa wisata Lerep sudah mengoptimalkan antara potensi sumber daya alam, potensi sosial, dan potensi kreasi budaya, untuk mendorong kemajuan pariwisata Desa Wisata Lerep, hal tersebut mendorong meningkatnya jumlah wisatawan ke Desa Wisata Lerep, yang dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Jumlah Wisatawan Desa Wisata Lerep

No.	Tahun	Jumlah Wisatawan
1.	2022	2.768 wisatawan
2.	2023	6.211 wisatawan
3.	2024	9.570 wisatawan

Sumber: website desa wisata lerep 2024

Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Lerep tentu memberikan dampak positif bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat, serta membuat desa wisata Lerep berkembang setiap tahunnya, mulai dari awal penetapan pada tahun 2015, 2016 – 2018 desa wisata rintisan, 2018 -2019 menjadi desa wisata berkembang, dan tahun 2019-sekarang sudah menjadi desa wisata dalam klasifikasi desa wisata maju. Adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Desa Lerep, mendorong adanya pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, melalui pembukaan penginapan, tempat makan bagi wisatawan, pemandu wisata, dan pengembangan objek wisata baru lainnya.

Peningkatan kunjungan yang diperoleh Desa Wisata Lerep ini masih mengalami kendala terkait dengan partisipasi kelompok sadar wisata yang ikut serta mengelola desa wisata lerep. Hal ini merujuk pada penelitian berjudul “Peran Kelompok Sadar Wisata Rukun Sentosa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang” (dalam Keisha, Fatihah. Fitriyah.2025) menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata Lerep terdapat 3 kelompok sadar wisata, yaitu Pokdarwis Rukun Santoso, Pokdarwis Soka Ceria, dan Pokdarwis Indrokilo Mulyo. Ketiga kelompok sadar wisata tersebut belum berpartisipasi secara optimal dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata Lerep, hanya Pokdarwis Rukun Santoso yang berhasil menunjukkan keberhasilan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa Lerep. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pokdarwis rukun Sentosa melakukan berbagai inovasi dalam pengembangan desa wisata lerep, seperti penjualan paket wisata yang memberikan kemudahan wisatawan dalam menentukan jenis wisata apa saja yang akan dilakukan Ketika berkunjung ke Desa Lerep. Pokdarwis rukun Sentosa juga sudah memiliki inisiatif dalam pendataan jumlah kunjungan wisatawan sejak tahun 2022, sementara dalam pengembangan kesadaran masyarakat, pokdarwis rukun Sentosa menerapkan prinsip Sapta Pesona, yaitu aman, bersih, tertib, sejuk, ramah, indah serta kenangan guna membangun kondisi pariwisata kondusif dan nyaman bagi wisatawan yang berkunjung.



Gambar 1. 3 Paket Wisata Desa Lerep

Sumber: Jejaring desa wisata Kemenparekraf 2025

Sementara dua Pokdarwis yaitu pokdarwis soka ceria dan pokdarwis indrokilo mulyo masih mengalami kemunduran. Seperti pokdarwis soka ceria yang mengalami kevakuman setelah adanya pandemi Covid-19, sementara pokdarwis indrokilo mengalami permasalahan internal terkait dengan sistem kepemimpinan dan keanggotaan pokdarwis yang sebagian besar berusia sekitar 40 tahun yang tentunya akan mempengaruhi kinerja dari pokdarwis indrokilo mulyo. Hal ini menyebabkan beberapa permasalahan dalam pengelolaan destinasi wisata di dusun indrokilo, seperti kurangnya fasilitas yang ada di salah satu destinasi wisata unggulan di desa indrokilo, yaitu curug indrokilo yang tidak memiliki penjaga, dan akses jalan yang sulit dilalui. Hal ini menunjukkan ketidaksinambungan dalam pengelolaan, lemahnya kapasitas organisasi, dan kurangnya dukungan dari berbagai pihak. belum mampu memenuhi tahapan pemberdayaan pada aspek pengkapasitasan dan pendayaan. Adanya permasalahan yang dialami oleh Pokdarwis di Desa wisata Lerep tersebut, tidak menghalangi desa Lerep dalam

mengelola dan mengembangkan berbagai potensi yang ada di desa Wisata Lerep. Hal ini dapat dilihat dari berbagai penghargaan yang diterima Desa Lerep dalam pengelolaan dan perkembangan desa wisata. Adapun beberapa penghargaan yang pernah diperoleh Desa Wisata Lerep Adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Penghargaan yang diterima oleh Desa Wisata Lerep

No	Penghargaan Desa Wisata Lerep	Asal Penghargaan
1.	Juara Umum Festival Desa Wisata Jateng 2017	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
2.	Juara II Apresiasi Kelembagaan Pokdarwis Jawa Tengah 2018	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tenga
3.	Juara I Festival Kuliner Ndeso 2019	Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang
4.	Juara I Lomba Festival Desa Wisata dan Jambore Pokdarwis Kabupaten Semarang 2019	Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang
5.	Juara Harapan II Festival Kesenian Tradisional Jateng] Fair 2019	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
6.	Penghargaan Desa Wisata Berkelanjutan Tingkat Nasional Tahun 2020	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7.	Penghargaan Desa Wisata Berkelanjutan Tahun 2021	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia
8.	Penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2021	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia
9.	Juara III Nasional Desa Brilian Tahun 2023	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)
10.	Juara I Lomba Wana Lestari Tahun 2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah III
11.	Penghargaan sebagai kolaborator dalam kegiatan The 5th PSYCHE 2023	Universitas Diponegoro
12.	Juara I desa Peduli Daerah Aliran Sungai Lestari Jawa Tengah Tahun 2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13.	Juara umum desa wisata berdikari tahun 2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang
14.	Juara III lomba desa wisata Nusantara Tahun 2024	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Sumber: Website Desa Wisata Lerep

Dalam data tabel 1.4 menunjukkan bahwa Desa Wisata Lerep berhasil mengelola potensi desa dengan baik, sehingga Desa Wisata Lerep mampu meraih beragam penghargaan di tingkat daerah maupun nasional. Keberhasilan yang diperoleh Desa Wisata Lerep ini juga menarik desa wisata lainnya untuk melaksanakan kegiatan studi banding guna memperluas wawasan dan pengetahuan

yang selanjutnya akan diimplementasikan menjadi lebih baik (Muhammad, Eko P.2022).



Gambar 1. 4 Kegiatan studi banding ke Desa Wisata Lerep

Sumber: Website Desa Wisata Lerep

Beberapa desa yang melakukan studi banding di Desa Lerep adalah Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dan Kelurahan Bleberan Kabupaten Gunungkidul. Kedua daerah ini sama – sama mempelajari terkait dengan keberhasilan pengelolaan Desa Wisata Lerep sebagai salah satu desa wisata mandiri, yang melihat pengembangan dan pengelolaan wisata Desa Lerep yang tidak hanya didibangun dan dikelola oleh alokasi dana desa atau bantuan pemerintah, melainkan dari swadaya masyarakat Desa Lerep dan juga program CSR (*Corporate Social Responsibility*) atas partisipasi Desa Lerep dalam berbagai lomba desa wisata yang sangat mendorong pengembangan dan pengelolaan Desa Lerep. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan praktek terbaik (*best practice*) pengelolaan dan pengembangan Desa

Wisata Lerep dalam keberhasilan sebagai desa wisata maju di Kabupaten Semarang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana *Best Practice* Kepariwisata di desa wisata Lerep?
2. Apa saja faktor pendukung *Best Practice* pengembangan Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis *best practice* pariwisata di desa wisata Lerep Kabupaten Semarang
2. Menganalisis faktor pendukung pengembangan Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan manfaat memperkaya kajian bidang administrasi publik, terkait dengan konsep *best practice*, khususnya dalam proses pengembangan dan pengelolaan desa wisata untuk mewujudkan desa wisata maju.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sarana dalam memperdalam pemahaman mengenai *best practice* pengelolaan desa wisata

b. Bagi Pemerintah Desa dan Instansi Terkait

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah Kabupaten Semarang, serta dapat menjadi referensi atau rujukan bagi pengelola desa wisata lainnya sebagai contoh pengelolaan desa wisata yang berhasil mendorong kemajuan desa.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan pembaca, terkait dengan bagaimana praktik terbaik pengelolaan desa wisata

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 5 Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti, judul, tahun, jurnal	Metode dan Teori	Hasil Penelitian	Perbandingan Penelitian
1.	Mushthafa Is Nurwanda; Budi Setiyono; Wijayanto Analisis Upaya Pemberdayaan Desa Wisata Pandanrejo dalam Keberhasilan Menjadi 50 Desa Wisata Unggulan Kemenparekraf Tahun 2021 (2022). <i>Journal of Politic and Government Studies</i>	Metode Kualitatif Deskriptif Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemberdayaan menurut Hendrayantoro (2014: 52) melalui tahapan pemberdayaan, yaitu sosialisasi, transformasi, dan tahapan kemandirian	Melalui penerapan tahapan sosialisasi yang tepat desa wisata Pandanrejo mampu memenuhi kategori desa wisata unggulan menurut kemenparekraf, yaitu homestay, kategori CHSE , kategori toilet, kategori souvenir, desa digital, daya tarik wisata, dan kategori konten kreatif. Melalui pemberdayaan masyarakat desa Wisata Pandanrejo mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki, yaitu alam, ternak, kebudayaan dan masyarakatnya.	Penelitian ini sama – sama berfokus pada pengelolaan dan pengembangan desa wisata, perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada bagian teori yang digunakan, penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan sementara penulis menggunakan konsep <i>Best Practice</i> dalam melihat pengelolaan desa wisata
2.	Ilham Junaid Tantangan dan Strategi Pengelolaan Desa Wisata: Perspektif Peserta Pelatihan Pariwisata (2023) <i>Journal Of Mandalika Review</i>	Metode Kualitatif Deskriptif Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Scott (2014) bahwa institusi terbentuk karena adanya aktor yang berperan sebagai pelaku dan kejadian yang	Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan desa wisata diperlukan adanya peran bersama pemangku kepentingan desa wisata, yang nantinya akan menekan terjadinya konflik internal kelembagaan dalam pengelolaan desa wisata. Seperti adanya konflik internal dalam Kelembagaan POKDARWIS. Penelitian ini juga	Penelitian ini menekankan masih adanya permasalahan dalam kelembagaan pengelolaan desa wisata, sementara penelitian yang dilakukan penulis menekankan analisis pengelolaan desa wisata lerep yang sudah berhasil mendorong terwujudnya kelembagaan desa wisata lerep yang berhasil membawa

		dibentuk oleh adanya tindakan dan keinginan dari masa lampau. Teori ini menekankan bahwa setiap kebijakan memerlukan pertimbangan yang rasional	menjelaskan pentingnya pelatihan pariwisata bagi pengelola kelembagaan suatu desa wisata.	keberhasilan desa wisata lerep menjadi desa wisata maju
3.	Lailiya Afrida Andriyani; Tri Yuniningsih; Titik Djumiarti Peran Stakeholder dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang (2024) <i>Journal of Public Policy and Management Review</i>	Metode Kualitatif Deskriptif Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Bryson (2004) melalui pemetaan stakeholders, yang berfokus pada power dan interest. Power adalah kekuasaan yang dimiliki untuk membuat atau mempengaruhi kebijakan, sedangkan interest adalah kepentingan yang dimiliki pembuat kebijakan.	Penelitian ini menunjukkan adanya faktor pendorong dan penghambat dalam pengembangan desa wisata lerep, melalui analisis peran stakeholder, faktor pendorong pembangunan desa wisata adalah adanya kreativitas dan kepercayaan pengurus Pokdarwis, sedangkan faktor penghambatnya adalah adanya kesalahpahaman, kurangnya penguatan organisasi dan kurangnya komunikasi pemerintah dengan masyarakat	Penelitian ini memiliki lokus yang sama, yaitu di Desa Lerep Kabupaten Semarang, namun penelitian yang dilakukan penulis, menganalisis bagaimana Desa Lerep dapat terus mengembangkan desa wisatanya sehingga dapat memperbaiki faktor – faktor penghambat kemajuan desa wisata lerep yang ada pada penelitian sebelumnya.
4.	Diah Farah Fauziah, Retna Hanani, Kismartini (2023) Koordinasi Dalam Kolaborasi Antar Stakeholders Pengembangan Desa Wisata Jungsemi	Metode Kualitatif deskriptif Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>Collaborative Governance</i> (dalam Cahya, 2020) menurut Ansell dan Gash, bahwa pemerintah melibatkan berbagai	Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata diperlukan adanya koordinasi antar <i>stakeholder</i>. Dalam pengelolaan desa wisata Jungsemi ditemukan bahwa kurangnya kompetensi, komitmen, rendahnya kualitas SDM dan rendahnya pengetahuan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terkait dengan teori dan lokus yang digunakan, penulis menggunakan Pendekatan <i>Best Practice</i> dalam melihat keberhasilan suatu desa wisata, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan <i>Collaborative governance</i> dalam

	Kecamatan Kaangkung Kabupaten Kendal (2023) <i>Journal of Public Policy and Management Review</i>	<i>stakeholders</i> secara bersama - sama dalam mencapai satu tujuan yang sama. Penelitian ini juga menggunakan teori koordinasi menurut Mooney dan Reily (dalam Handayani, 1990) koordinasi adalah menyatukan beberapa kegiatan dan tindakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama.	dapat menjadi kendala dalam perkembangan desa wisata	melihat keberhasilan suatu desa wisata
5.	Malik Mubarak; Diana Hertati (2023) Strategi Pengembangan Desa Wisata Rintisan Oleh BUMDes di Desa Wisata Pandanrejo (2023) Jurnal Ilmu Administrasi Publik	Metode Kualitatif Deskriptif Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengembangan pariwisata Menurut Suwanto (2004), yang terdiri dari pemasaran, aksesibilitas, kawasan pariwisata, jenis objek pariwisata, produk wisata, sumber daya manusia, kampanye nasional melalui pembentukan kelompok sadar wisata.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan desa wisata masih terdapat delapan sasaran kajian BUM Desa “Lancar Jaya” bersama dengan Pengelola Desa Wisata Pandanrejo telah melakukan tujuh langkah strategi secara optimal dan satu strategi yang belum dilakukan secara optimal dalam pengembangan desa wisata rintisan di Desa Wisata Pandanrejo.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah teori pengembangan pariwisata yang digunakan hanya berfokus pada peran BUMDes Pandanrejo, sedangkan penulis menekankan pada aspek yang lebih luas dalam pengelolaan suatu desa wisata

6.	Erna Dwi Ningsih; Atika Wijaya Modal Sosial sebagai Strategi Penanganan Stagnasi Pengembangan Desa Wisata Liyangan <i>Indonesian Journal Of Sociology, Education and Development</i>	Metode Kualitatif Deskriptif Teori yang digunakan adalah teori modal sosial Robert Putnam (dalam Usman,2018) menjelaskan bahwa modal sosial berkaitan dengan nilai kolektif, konsensus dan integrasi sosial, yang memiliki 3 komponen utama, yaitu asosiasi sukarela, kepercayaan dan norma sosial	Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori modal sosial, memberikan dampak positif bagi desa wisata liyangan yang digunakan masyarakat desa wisata untuk mengembangkan program desa wisata yang mengalami stagnasi. Dalam penelitian ini juga menekankan bagaimana memperkuat hubungan sosial masyarakat untuk mengembangkan desa wisata liyangan.	Perbedaan penelitian ini terletak pada lokus yang digunakan untuk melihat model pengembangan desa wisata. Teori dalam penelitian ini juga menekankan akan bentuk modal sosial berkaitan dengan hubungan sosial masyarakat, sedangkan penelitian penulis memberikan analisis lebih luas terkait prespektif pengembangan desa wisata.
7.	Rasmadi Didik Aryadi Analisis Pengembangan Desa Wisata Sebagai <i>Best Practice</i> Penggunaan Dana Desa Untuk Mewujudkan <i>Good Governance</i> dan <i>Collaborative Governance</i> (2022) Jurnal Imliah Indonesia	Metode Kualitatif Deskriptif Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori good governance menurut Nofianti (2015) adalah suatu pemerintahan yang baik, mengutamakan kepentingan masyarakat, dan tercapainya aspek aspek fungsional.	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip <i>good governance</i> pengembangan desa wisata menunjukkan keberhasilan dalam peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat dan keberlanjutan desa wisata. Hal ini menunjukkan bahwa praktik terbaik <i>good governance</i> dapat diterapkan untuk mendukung pembangunan tidak hanya pada tingkat tetapi juga tingkat desa.	Penelitian ini sama – sama melihat praktek terbaik dari pengelolaan desa wisata, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah fokus penelitian, yang mana penelitian ini berfokus pada praktek <i>good governance</i> yang dilakukan oleh desa wisata, sedangkan penelitian penulis menekankan komponen <i>best practice</i> secara lebih luas.
8.	Niki Hannanji; Ketut Bagiastra; Rizal Kurniasih	Metode Kualitatif Deskriptif Toeri dalam penelitian ini adalah teori Community	Penelitian ini menunjukkan pengembangan desa wisata, meskipun partisipasi masyarakat sudah sangat baik dalam proses pengembangan desa wisata, namun	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terkait dengan implementasi teori yang digunakan serta lokus penelitian, dimana penelitian penulis

	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Bayan (2022) <i>Journal Of Responsible Tourism</i>	Based Tourism (Prabawati:2013) yang menekankan pengembangan wisata melalui pemberdayaan masyarakat lokal, dalam perencanaan, pengelolaan dan partisipasi keputusan dalam pembangunan wisata	tidak diikuti dengan dukungan pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat desa wisata bayan, sehingga pengembangan dan pengelolaan desa wisata bayan masih belum optimal	menganalisis pengelolaan dan pengembangan desa wisata menggunakan pendekatan <i>best practice</i> yang dilakukan di desa wisata Lerep
9.	Tegar Tri Wahyudi; Hafizah Awalia, Farida Hilmi Peran Agen Struktur Dalam Pengembangan Desa Wisata Pada Masyarakat Pesisir Pantai Desa Labuhan Kertasari (2024) Seminar Nasional Sosiologi	Metode Kualitatif Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Strukturisasi dari Anthony Giddens (dalam Kamuri,2021) aktor atau kelompok individu yang berinteraksi dan bertindak di masyarakat memiliki peran dalam memelihara struktur sosial.	Dalam pengembangan desa wisata Labuhan Kertasari struktur menjadi landasan setiap agen atau aktor pengelola desa wisata dalam melakukan kegiatan wisata, yang dipengaruhi oleh pengalaman agen yang berdampak positif pada perkembangan struktur pengembangan Desa Wisata Labuhan Kertasari.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terkait dengan lokus penelitian yang berbeda, serta fokus penelitian ini lebih melihat pengaruh struktur pengelola Desa wisata, tetapi penelitian ini sama-sama menganalisis praktik pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata
10.	Tito Mariano Y, dkk (2023)	Metode Kualitatif deskriptif Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Penta Helix dari Arif Yahya (2016) dengan memvisualisasikan interaksi kolektif antar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima pemangku kepentingan masing masing sudah berperan sesuai bidangnya dalam pengembangan Desa Wisata Pandean, namun kerjasama antara para pemangku kepentingan masih belum optimal.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terkait dengan teori yang digunakan dalam melihat pengembangan wisata menggunakan sistem penta helix yang berfokus pada interaksi pemangku kepentingan, sedangkan dalam konsep <i>best practice</i> keberhasilan program dilihat dari

		pemangku kepentingan, diantaranya Academic, Bussiness, Community, Government, Media		dampak, kemitraan, keberlanjutan, kepemimpinan, dan transfer ke daerah lainnya.
--	--	--	--	---

Sumber: Data diolah Penulis, 2025

Penelitian terdahulu yang terdapat dalam tabel 1.5 memiliki berbagai macam fokus dan lokus yang berbeda-beda, namun persamaan yang terdapat dalam penelitian diatas adalah berkaitan dengan pengembangan desa wisata sebagai strategi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat rakyat desa. Perbedaan penelitian terdapat pada teori yang digunakan sebagai indikator keberhasilan pengembangan desa wisata. Penelitian ini menggunakan kebaruan atau novelty dengan menganalisis pengembangan desa wisata menggunakan konsep prakttek terbaik (*best practice*) Menurut UN Habitat (dalam Eko, Prasajo. *et.all* 2004) dan penggunaan konsep *best practice* ini belum pernah digunakan pada pengembangan Desa Wisata Lerep pada penelitian – penelitian yang sudah dilakukan.

1.5.2 Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano (dalam Kamaruddin Sellang, 2016:42) berpendapat bahwa administrasi public merupakan proses sumber daya dan personil publik yang diatur dengan tujuan untuk perumusan, implementasi, dan pengelolaan keputusan kebijakan publik. Sedangkan bagi Filex A. Nigro dan L. Loyd G. Nigro (dalam Pasolong, 2010;8) administrasi publik adalah sebuah wujud kerjasama grup yang mana mayoritas berada di skala pemerintahan, yang mana memiliki 3 aspek yakni eksekutif, legislatif serta relasi kedua unsurnya. Administrasi publik mempunyai peran esensial perihal perumusan manifestasi pemerintahan yang mana itu menjadi bagian atas prosesi politik, administrasi publik berkausalitas erat akan banyak jenis kelompok swasta serta personalia perihal penyajian layanan pada khalayak umum. Sementara bagi Nicholas Henry (dalam Mulyadi, 2016; 34) Administrasi Publik adalah sebuah elaborasi kompleks terkait teori dengan praktik

yang mana dimaksudkan guna mempromosikan pemahaman akan pemerintahan terkait relasi masyarakat guna menyokong kebijakan publik supaya kian responsive akan kebutuhan sosial. Berdasarkan pengertian administrasi publik menurut beberapa ahli diatas, maka dapat diambil satu kesatuan, bahwa administrasi publik adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah, untuk mengelola kegiatan untuk kepentingan masyarakat, yang mencakup kerjasama antar berbagai lembaga untuk mewujudkan pelayanan terbaik bagi kesejahteraan masyarakat atau publik. Penelitian ini termasuk dalam konsep administrasi publik, karena meneliti tentang pengelolaan dan pengembangan desa wisata sebagai bentuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat desa.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Menurut pendapat Nicholas Henry (dalam Miftah Thoha, 2008:18), berpendapat bahwa terdapat perbedaan definisi dalam administrasi negara, untuk memahami lebih jauh administrasi negara melalui paradigma administrasi publik terbagi menjadi enam paradigma administrasi publik, yaitu:

1. Dikotomi antara politik dan administrasi tahun 1900-1926

Paradigma ini memiliki fokus pada pemisahan terkait dengan perbedaan antara urusan politik dan urusan administrasi dalam pelaksanaan fungsi utama pemerintahan. Urusan politik tersebut terbatas pada aspek-aspek politik semata, kebijaksanaan dan pemerintahan, sementara urusan administrasi berfokus pada problematika organisasi, kepegawaian, serta manajemen budgeting yang terjadi pada birokrasi pemerintah. Locus politik meliputi badan legislatif dan yudikatif yang memiliki tugas pokok dalam membuat kebijaksanaan dalam memenuhi

keinginan negara. Sementara locus administrasi berkenaan dengan pelaksanaan dan realisasi kebijakan tersebut (Goodnow,1900:10-11). Tokoh yang mendukung paradigma ini antara lain adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White.

2. Prinsip-Prinsip Administrasi Negara tahun 1927-1937

Dalam paradigma ini *focus* merupakan hal yang paling penting daripada *locus* yang tidak dipermasalahkan. Administrasi publik dilihat sebagai sesuatu yang memiliki sifat global, yang bisa dilaksanakan guna seluruh struktur administrasi tanpa memperhatikan budaya, lingkungan, misi dan kerangka institusi. Prinsip administrasi negara ini dikenal dengan prinsip POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting*) yang menjadi fokus administrasi Publik. Tokoh – tokoh yang terkenal dalam paradigma ini adalah Willoughby Gullick dan Urwick yang mendapatkan pengaruh dari tokoh manajemen klasik Henry Fayol.

3. Administrasi negara sebagai ilmu politik tahun 1950-1970

Paradigma ini ditandai dengan kembalinya eksistensi administrasi publik sebagai ilmu politik yang pada pokoknya adalah pengabdian kepada kekuasaan yang mempunyai kekuasaan penuh perihal membangun penguasa dalam memerintah secara efisien. Dalam paradigma ini locus administrasi publik adalah lingkungan birokrasi pemerintahan. Tokoh yang terkenal dalam paradigma ini adalah Morsetein Marx yang berpendapat bahwa tidak mungkin dan tidak realistis jika dua hal antara politik dan administrasi dilakukan pemisahan.

4. Administrasi negara sebagai ilmu administrasi tahun 1956- 1970

Paradigma ini memiliki fokus pada analisis manajemen, perilaku organisasi, penerapan teknologi yang modern, analisis mengenai sistem administrasi, hal tersebut merupakan suatu bentuk pengembangan prinsip manajemen secara lebih detail dan mendalam. Dalam paradigma ini menekankan bahwa fokus yang dikembangkan dapat diterapkan pada dunia bisnis dapat diterapkan dalam aspek administrasi negara, sehingga lokus dalam paradigma ini menjadi bias.

5. Administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara tahun 1970-sekarang

Paradigma ini merupakan administrasi yang memiliki focus dan locus yang secara jelas, yang mana fokusnya adalah ilmu administrasi murni, manajemen, kebijakan, dan juga organisasi. Sementara *locus* dalam paradigma ini merupakan lingkup permasalahan publik dan kepentingan yang berkaitan dengan publik.

Merujuk pada penjelasan terkait paradigma administrasi publik sebelumnya, penelitian ini menggunakan paradigma kelima, yaitu administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara, hal ini karena penerapannya menekankan pada analisa manajemen publik, dapat memberikan dampak pada masyarakat atau publik.

1.5.4 Manajemen Publik

Manajemen publik bagi Shafritz dan Russel (dalam Keban, 2008: 93) merupakan usaha yang ditempuh individu maupun sekelompok orang ketika melaksanakan sebuah organisasi serta pendayagunaan sumber daya manusia perihal pencapaian tujuan organisasi. Overman (dalam Keban, 2004: 85) mengemukakan

pendapatnya bahwasannya Manajemen publik bukan sekadar “manajemen ilmiah” yang menekankan efisiensi produksi, “analisis kebijakan” yang menekankan analisis kebijakan, dan administrasi publik yang menekankan manajemen birokrasi sehari-hari. Sebaliknya, manajemen publik merupakan kajian interdisipliner yang mencakup berbagai aspek struktur organisasi secara umum. Hal ini mencakup fungsi-fungsi administratif seperti perencanaan, pengorganisasian dan manajemen, namun juga mempertimbangkan aspek-aspek spesifik yang berkaitan dengan pemberian layanan publik dan kepentingan masyarakat dalam struktur tersebut. Manajemen publik juga berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia, moneter, fisik, informasi, serta politik. Di samping itu, Donovan dan Jackson (2013: 11-12) juga menyatakan bahwa manajemen publik merupakan kegiatan yang dijalankan mendetail serta seluruh keahliannya. Pendapat para ahli di atas dipertegas oleh pernyataan J. Steven Ott, Albert C. Hyde, dan Jay M. Shafritz dalam bukunya yang berjudul “*Public Management: Essential Readings*” bahwa manajemen publik memusatkan manajer publik menjadi praktisi dari suatu profesi yang berkaitan dengan masyarakat. Manajemen publik memfokuskan atensinya pada operasi serta implementasi internal organisasi pemerintah dikompensasikan akan relasi serta Berinteraksi dengan organisasi legislatif, yudikatif, atau sektor publik lainnya. Manajemen publik merupakan bentuk pengelolaan sektor publik oleh institusi publik secara profesional melalui pendayagunaan berbagai potensi dan sumber daya organisasi, untuk menciptakan pelayanan publik yang prima. (Shafritz & Russell dalam Keban, 2008) Menurut Iwan Satibi, 2023 terdapat

sejumlah prinsip dasar dalam Efektivitas implementasi pengelolaan sektor publik, yaitu:

1. Akuntabel, berkaitan dengan pelaksanaan manajemen publik harus dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan program yang telah ditentukan.
2. Transparansi, berkaitan dengan implementasi manajemen publik perlu dilakukan secara terbuka dan memungkinkan akses serta pengawasan dari para pemangku kepentingan
3. Responsive, pelaksanaan manajemen publik harus mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat.
4. Efektif, berkaitan dengan bagaimana manajemen publik dapat, memperhatikan prinsip efektivitas, yang dapat dilihat melalui pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
5. Efisien, berkaitan dengan implementasi manajemen publik memerlukan pemanfaatan sumber daya organisasi, khususnya anggaran, secara cepat, akurat, dan sesuai prioritas kebutuhan.
6. Adaptif, pelaksanaan manajemen publik harus mampu mengikuti berbagai perkembangan ilmu pengetahuan
7. Rasional, program dan pelaksanaan manajemen publik harus terukur, sistematis, dan mudah dipahami, mengapa program tersebut harus dilaksanakan
8. Profesional, pelaksanaan manajemen publik harus dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten.

Penerapan manajemen publik dalam konteks penelitian ini adalah terkait dengan pengelolaan dan keberhasilan pengembangan desa wisata Lerep yang merupakan bentuk pelayanan publik oleh pemerintah desa, bersama masyarakat untuk untuk mendorong terciptanya keberhasilan desa wisata Lerep.

1.5.5 Best Practice

Best practice menurut UN Habitat (dalam Eko, Prasajo. *et.all* 2004) didefinisikan sebagai inisiatif yang sukses memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas kehidupan yang baik. kesuksesan *best practice* dapat dilihat melalui; adanya dampak yang dapat diterapkan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, kesuksesan *best practice* juga harus membangun kerjasama yang efektif antar berbagai sektor, baik dari unsur publik, swasta, dan masyarakat pada akhirnya dapat berlangsung secara berkelanjutan yang memberikan manfaat pada dimensi sosial, budaya, ekonomi, serta lingkungan hidup. Teori *best practice* ini didasarkan pada suatu metode tertentu yang sudah terbukti memberikan hasil terbaik dan dapat diterapkan oleh organisasi atau pihak lainnya dalam meningkatkan kinerja atau hasil yang diinginkan. Melalui perspektif *best practice* ini dapat memberikan kerangka analisis terkait dengan identifikasi praktek terbaik yang berkontribusi dalam keberhasilan desa wisata Lerep sebagai desa wisata maju. Perspektif *best practice* juga dapat membantu dalam mengidentifikasi praktik pengelolaan desa wisata Lerep yang bersifat umum dan praktik khusus dalam mendukung keberhasilan desa wisata lerep. Hal ini dapat memberikan kontribusi terkait dengan praktik terbaik pengelolaan dan pengembangan desa wisata, yang dapat dijadikan contoh atau model dalam pengembangan desa wisata lainnya.

Dalam menganalisis teori *best practice* terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan praktik terbaik yang dilakukan oleh suatu organisasi. Kriteria penilaian *best practice* menurut Eko, Prasajo. *et.all.* (2004) terdiri dari:

1. Dampak (*impact*)

Sebuah inisiatif atau program harus memberikan dampak yang menghasilkan perubahan positif yang dapat diukur dan diamati secara langsung (*tangible*) dalam meningkatkan kondisi sosial-ekonomi. Dampak yang diberikan harus bersifat inklusif yang tidak hanya menguntungkan sebagian kecil kelompok tertentu, namun harus lebih luas menjangkau masyarakat lainnya yang membutuhkan.

2. Kemitraan (*partnership*)

Implementasi *best practice* yang efektif tidak hanya dijalankan secara mandiri, tetapi harus melibatkan berbagai pihak yang mendukung proses pengelolaan dan pencapaian tujuan, setidaknya harus melibatkan dua pihak atau lebih yang saling bekerja sama dalam mendapatkan hasil yang optimal. Kemitraan harus menunjukkan adanya komitmen bersama, komunikasi yang terbuka, dan mekanisme kerjasama yang adil dan transparan berbagai aktor yang terlibat.

3. Keberlanjutan (*sustainability*)

Keberlanjutan dalam perspektif *best practice* harus menunjukkan, bahwa dampak positif dari *best practice* dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang, keberlanjutan yang dimaksud tidak hanya terkait dengan aspek keuangan dan teknis, namun juga perubahan secara

sistemik dan struktural. Keberlanjutan harus memberikan perubahan dasar terkait dengan beberapa hal, yaitu 1) perubahan dalam legislasi atau kerangka hukum dan kebijakan formal yang dapat mendorong terciptanya standar pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 2) suatu perubahan dasar yang dilakukan melalui sebuah kebijakan atau program yang sudah berhasil dalam mengatasi permasalahan pada sektor tertentu, nantinya dapat dijadikan contoh dan diterapkan pada daerah lainnya yang memiliki permasalahan serupa untuk mencari penyelesaian masalah. 3) untuk mencapai keberlanjutan dari sebuah program atau organisasi, diperlukan adanya kejelasan peran serta tanggung jawab bagi pihak yang terlibat, untuk meminimalisir terjadinya konflik. 4) keberlanjutan juga harus didukung oleh adanya sistem yang efisien, transparan, dan sistem manajemen yang akuntabel dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

4. Kepemimpinan (*leadership*). Dalam perspektif *best practice* analisis kepemimpinan memiliki peranan penting dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan, kepemimpinan yang inspiratif mendorong terciptanya kebijakan publik yang mendorong terciptanya keterbukaan terhadap perkembangan dan perubahan sosial budaya.

5. Dapat ditransfer (*transferability*)

Setiap inovasi yang dihasilkan oleh sebuah daerah atau organisasi merupakan ide atau solusi yang dihasilkan berdasarkan kebutuhan suatu daerah atau organisasi tertentu. Inovasi yang dihasilkan ini nantinya

harus memberikan manfaat ke organisasi atau daerah lainnya. Melalui penerapan inovasi atau program yang dihasilkan untuk menyelesaikan permasalahan serupa yang terjadi di daerah atau organisasi lainnya. Transferability ini dapat dilakukan melalui pemberian pelatihan, seminar, media sosial, kerjasama antar lembaga atau daerah, buku panduan, maupun kegiatan lainnya yang berdampak positif bagi pihak lainnya.

1.5.6 Pariwisata

Pariwisata secara etimologis istilah pariwisata berasal dari bahasa sanskerta yang terdiri dari atas dua kata, yaitu “pari” bermakna berulang kali, berkeliling, dan “wisata” yang berarti perjalanan. Oleh karena itu, pariwisata dimaknai sebagai aktivitas perjalanan yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain, baik secara berkeliling maupun berulang (Yoeti, 1981:103). Pariwisata merupakan kegiatan atau perjalanan yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu oleh seseorang atau sekelompok orang, untuk mencari kesenangan ataupun kepentingan lainnya diluar tempat tinggalnya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 pariwisata adalah berbagai jenis kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas atau layanan dan sistem penyediaannya dilakukan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Adanya pariwisata tentunya memiliki tujuan tertentu bagi suatu negara, salah satunya Indonesia yang menjabarkan tujuan kegiatan kepariwisataan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 antara lain:

1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi
2. Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. Menghapus angka kemiskinan
4. Mengatasi permasalahan pengangguran
5. Meningkatkan pelestarian alam, lingkungan dan sumber daya
6. Mendorong kemajuan kebudayaan Indonesia
7. Mengangkat citra bangsa dan mendorong rasa cinta tanah air
8. Memperkuat jati diri dan rasa kesatuan bangsa
9. Mempererat rasa persahabatan antarbangsa

1.5.7 Desa Wisata

Desa wisata menurut Nuryanti (dalam Nyta, Rosidha.dkk 2021) merupakan bentuk kolaborasi antara objek wisata, akomodasi, serta berbagai sarana penunjang lain yang ditampilkan melalui struktur kehidupan sosial masyarakat yang berdampingan dengan tradisi yang berlaku di suatu wilayah desa. Desa wisata adalah sebuah program pengembangan pariwisata yang berbasis pada masyarakat dan berkelanjutan. Menurut Joshi (dalam Suwarti & Maryani,T. 2023) desa wisata adalah pariwisata yang terdiri atas keseluruhan pengalaman pedesaan, atraksi alam, budaya, dan unsur unik secara keseluruhan dapat menarik minat wisatawan. Untuk menarik minat wisatawan. Bentuk pariwisata pedesaan dapat berupa kehidupan masyarakat desa yang memiliki keunikan khusus di dalamnya, seperti keindahan alam dan budaya, yang dapat menjadi peluang daya tarik bagi wisatawan, khususnya wisatawan asing. Terbentuknya desa wisata juga harus melibatkan kontribusi masyarakat, sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap potensi

pariwisata yang ada di lingkungannya, sehingga masyarakat dapat bersinergi dalam meningkatkan kualitas pariwisata desa. Kehidupan desa wisata berperan sebagai subjek dan juga objek kepariwisataan, yaitu sebagai penyelenggara dari berbagai aktivitas wisata yang nantinya akan dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat desa wisata secara langsung. (Menurut Nuryanti:1993) sebuah desa dapat dijadikan sebagai desa wisata harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki aksesibilitas yang baik untuk mendukung keterjangkauan wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata yang akan dikunjungi, menggunakan berbagai jenis transportasi.
2. Desa wisata harus memiliki objek-objek wisata yang menarik, baik objek wisata alam, seni, budaya dan objek wisata lainnya yang nantinya dapat dikembangkan secara lebih optimal.
3. Memiliki dukungan dari pihak masyarakat, aparat desa yang menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap kunjungan wisatawan yang datang ke destinasi desa wisata.
4. Memiliki tingkat keamanan desa yang dapat menjamin kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke desa wisata tersebut.
5. Desa wisata memiliki fasilitas akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai untuk proses kegiatan pariwisata.
6. Memiliki iklim yang sejuk dan dingin
7. Desa wisata memiliki hubungan dengan objek wisata lainnya yang terlebih dahulu sudah dikenal oleh masyarakat luas.

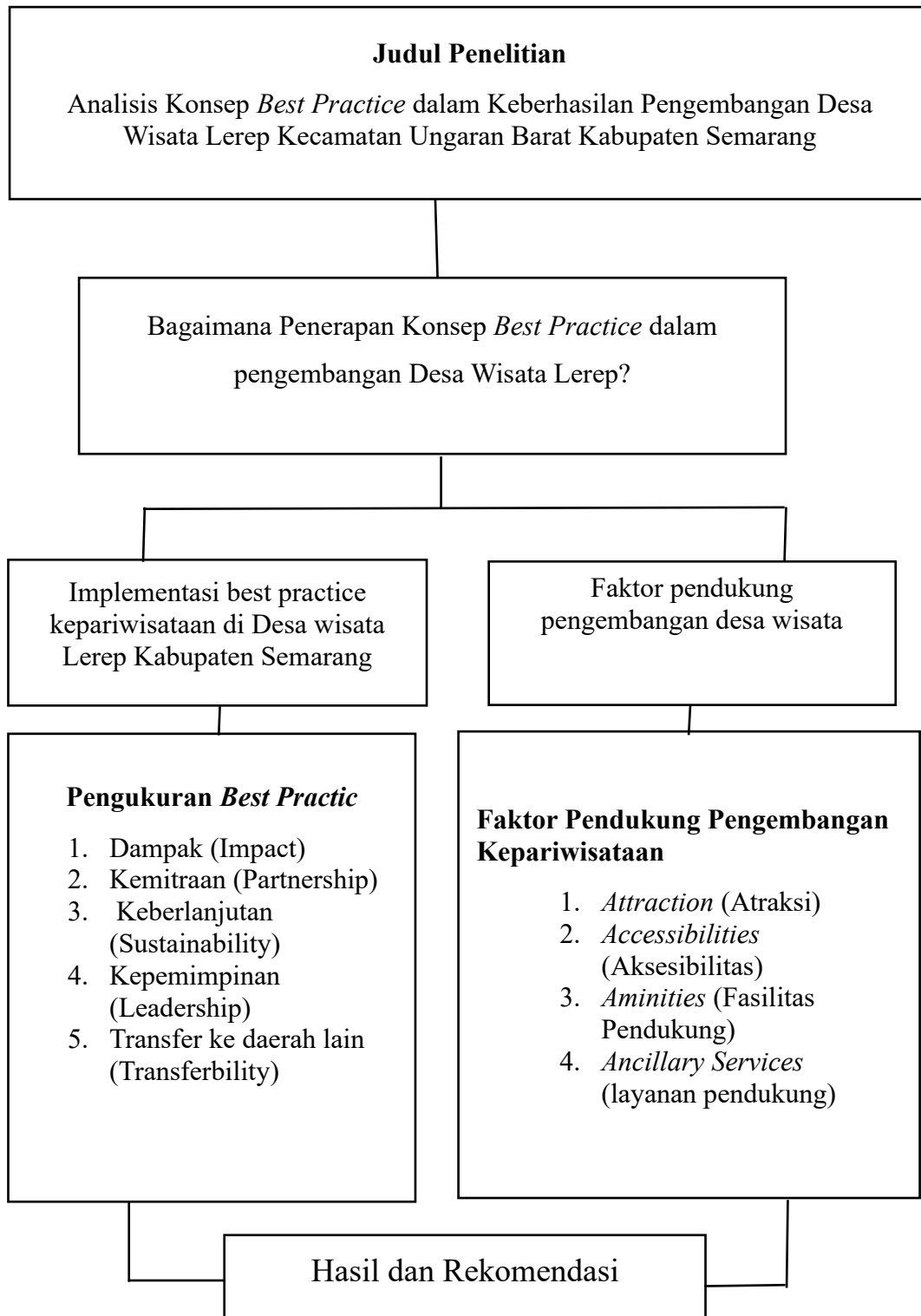
Pearce dalam Lestari (2024:4) pengembangan desa wisata merupakan suatu proses yang berfokus pada upaya untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas desa wisata. Secara lebih spesifik, pengembangan desa wisata dapat diartikan sebagai serangkaian usaha yang dilakukan untuk melengkapi, serta meningkatkan fasilitas wisata guna memenuhi kebutuhan dan harapan wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata. Sebagai sebuah destinasi wisata desa wisata harus memenuhi empat komponen utama dalam pengembangan pariwisata. Menurut Cooper. dkk (dalam Henita, Safitri & Dadan, K. 2021) unsur pengembangan potensi kepariwisataan terdiri dari:

1. *Attraction* (Atraksi) merupakan suatu produk wisata yang dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Atraksi ini terdiri dari, atraksi wisata alam, atraksi wisata budaya, dan atraksi wisata buatan seperti festival.
2. *Accessibilities* (Akses), merupakan sarana dan infrastruktur, untuk mendukung wisatawan berkunjung ke desa wisata, seperti kondisi jalan yang baik, adanya rambu lalu lintas, dan transportasi
3. *Amenities*, (Fasilitas Pendukung) berkaitan dengan adanya sarana dan prasarana, seperti penginapan, warung makan, layanan transportasi, agen perjalanan, sarana pendidikan, dan lain-lain.
4. *Ancillary Services* (layanan pendukung), berkaitan dengan adanya organisasi atau kelompok yang bertanggung jawab mengelola kegiatan desa wisata sehingga dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, pengembangan desa wisata adalah bentuk usaha yang terkoordinir dengan tujuan untuk melengkapi pelayanan, dan segala hal penunjang wisata untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang datang berkunjung.

1.6 Kerangka Pemikiran

Tabel 1. 6 Kerangka Pemikiran Peneliti



1.7 Operasionalisasi Konsep

Best practice pengembangan desa wisata Lerep merupakan identifikasi praktik terbaik yang diimplementasikan oleh pengelola desa dalam mendorong keberhasilan perkembangan desa wisata Lerep menjadi salah satu desa wisata maju di Kabupaten Semarang. Dalam menganalisis pengembangan desa wisata, peneliti melihat bagaimana implementasi *best practice* kepariwisataan di desa wisata Lerep dapat di analisis melalui beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut:

1. Dampak (*impact*) dengan melihat bagaimana pengelolaan dan pengembangan desa wisata Lerep memberikan dampak bagi warga desa. Gejala dampak yang akan diteliti, yaitu:
 - a. Dampak Ekonomi program Desa Wisata Lerep
 - b. Dampak Sosial dan Budaya program desa wisata pada masyarakat Desa Lerep
2. Kemitraan (*partnership*) melalui analisis kerjasama dari berbagai pihak dalam mendorong pengembangan desa wisata lerep. Gejala Kemitraan yang akan diteliti, yaitu:
 - a. Kemitraan Internal
 - b. Kemitraan Eksternal
3. Keberlanjutan (*sustainability*) melalui analisis keberlanjutan manfaat dari pengembangan desa wisata lerep, dapat bertahan lama atau tidak dalam memberikan manfaat pada masyarakat desa Lerep. Gejala keberlanjutan yang akan diteliti, yaitu:
 - a. Legislasi pengembangan Desa Wisata Lerep

- b. Inovasi Desa Wisata Lerep
 - c. Evaluasi Program Desa Wisata Lerep
4. Kepemimpinan (*leadership*) melalui analisis pemimpin yang mendorong pengembangan desa wisata Lerep. Gejala kepemimpinan yang akan diteliti, yaitu:
- a. Kepemimpinan pemerintah desa Lerep
 - b. Dampak Kepemimpinan Pemerintah Desa Lerep
5. Dapat ditransfer ke daerah lainnya (*transferability*) melalui analisis bagaimana pihak lain dapat belajar dan menerapkan berbagai inovasi ataupun sistem pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan oleh desa wisata Lerep, sehingga dapat bermanfaat bagi desa ataupun pihak lainnya. Gejala transfer yang akan diteliti adalah:
- Kegiatan transfer pengetahuan pengelolaan desa wisata Lerep oleh desa wisata lainnya

Faktor pendukung pengembangan desa wisata dapat dilihat melalui beberapa kriteria sebagai berikut:

1. *Attraction* (Atraksi) dengan melihat berbagai hal yang dapat menarik minat kunjungan wisatawan ke Desa Lerep. Gejala Atraksi yang akan diteliti, yaitu:
 - a. Keanekaragaman Objek wisata Desa Lerep
 - b. Pengelolaan objek wisata

2. *Accessibilities* (Akses) dengan melihat fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan oleh wisatawan menuju ke destinasi wisata Desa Lerep.

Gejala yang akan diteliti yaitu:

- a. Keterjangkauan akses menuju Desa Lerep
- b. Kemudahan akses informasi Desa Wisata Lerep

3. *Amenities*, (Fasilitas Pendukung) dengan melihat ketersediaan fasilitas pendukung bagi wisatawan di destinasi wisata Desa Lerep. Gejala yang akan diteliti adalah:

Ketersediaan fasilitas pendukung pada objek wisata Desa Lerep

4. *Ancillary Services* (layanan pendukung) dengan melihat keterlibatan dan dukungan organisasi, pemerintah daerah, maupun kelompok pengelola destinasi wisata Desa Lerep. Gejala yang akan diteliti, yaitu:

Kompetensi dan Koordinasi Pengelola wisata Desa Lerep

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk memahami gejala-gejala yang tidak membutuhkan kuantifikasi. Menurut Sugiyono (2016) metode penelitian kualitatif, merupakan metode yang berdasarkan pada filosofis, untuk meneliti kondisi ilmiah dimana peneliti menjadi instrumen kunci. Penelitian kualitatif berfungsi untuk mendeskripsikan fenomena penelitian, melalui aktivitas sosial, sikap, dan pandangan individu ataupun kelompok. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, menurut Sugiyono (2016) tipe

penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta atau kondisi yang sedang terjadi. Tipe penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan praktik terbaik pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Lerep, dan hasil yang dari pengelolaan desa wisata lerep melalui analisis perspektif *best practice*.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lokus atau tempat penelitian ini dilaksanakan. Penelitian ini memilih lokus penelitian di Desa Lerep, kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi desa Lerep ini karena penelitian ini berfokus pada pengelolaan dan pengembangan Desa Lerep sebagai salah satu desa wisata maju di Kabupaten Semarang, dan berhasil memperoleh berbagai penghargaan, sehingga penelitian ini penting dilakukan di Desa Wisata Lerep untuk menganalisis praktik terbaik pengelolaan dan pengembangan desa wisata..

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu atau sekelompok orang yang memberikan informasi mengenai topik penelitian. Menurut Arikunto (2013:152) subjek penelitian adalah aspek yang menentukan pentingnya kedudukan penelitian, sehingga subjek penelitian harus diatur terlebih dahulu sebelum peneliti mengumpulkan data untuk keberlangsungan penelitian. Berdasarkan topik penelitian terkait dengan Analisis Konsep *Best Practice* Dalam Keberhasilan Pengembangan Desa Wisata Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu menentukan sampel yang digunakan sebagai sumber data

dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu, yaitu pihak yang terlibat langsung dan memiliki keterkaitan dengan kajian penelitian. Oleh karena itu peneliti menentukan subjek penelitian antara lain adalah:

Tabel 1. 7 Subjek Penelitian

No.	Subjek Penelitian	Alasan Pemilihan
1.	Kepala Desa Lerep	Kepala Desa Lerep dipilih karena bertanggung jawab atas pengelolaan desa lerep secara keseluruhan, serta menjadi pihak penggerak wisata Desa sejak awal ditetapkan Desa Lerep menjadi desa wisata
2.	Ketua Kelompok Sadar Wisata Rukun Santoso	Ketua Pokdarwis Rukun Santoso dipilih karena dari ketiga Pokdarwis yang ada di Desa Lerep, Pokdarwis inilah yang bertanggung jawab pada unit usaha wisata, yang mengetahui pengelolaan, kendala, dan keunggulan wisata apa saja yang ada di Desa Lerep
3.	Direktur BUMDes Gerbang Lentera	Direktur BUMDes Gerbang Lentera dipilih karena pengelolaan wisata desa dibawah naungan BUMDes, sehingga segala jenis kegiatan wisata harus dikomunikasikan dengan BUMDes
4.	Masyarakat	Kelompok terdampak langsung program desa wisata Lerep, baik dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan
5.	Wisatawan yang berkunjung ke wisata Desa Lerep	Pihak yang merasakan langsung bagaimana pengelolaan layanan wisata yang diberikan oleh pengelola wisata Desa Lerep, sehingga nantinya dapat diketahui kekurangan ataupun kelebihan dari wisata, yang dapat dijadikan sarana pengembangan dan perbaikan wisata Desa Lerep

Sumber: diolah oleh peneliti (2026)

1.8.4 Jenis Data

Jenis data menurut Sugiyono (2015:13) adalah data yang terdiri dari data kualitatif, data kuantitatif maupun gabungan dari data kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan gabungan dari keduanya untuk memperoleh analisis yang akurat dan sistematis. Data Kualitatif ini merupakan data yang berisi terkait narasi dan deskripsi mendalam, yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk melihat bagaimana pengelolaan dan pengembangan desa wisata Lerep, selain itu jenis data lainnya yang digunakan adalah data kuantitatif, yang berupa angka dan statistik terkait dengan jumlah wisatawan, pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat desa wisata lerep

1.8.5 Sumber Data

Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2016:157) mendefinisikan sumber data utama penelitian kualitatif adalah perkataan, tindakan, yang dapat bersumber dari buku, dokumen ataupun sumber data lainnya yang memuat informasi terkait dengan penelitian. Sumber data terdiri dari dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari hasil wawancara, dan observasi langsung. Data primer ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan, terkait dengan *best practice* dalam pengembangan desa wisata Lerep

2. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari berbagai sumber. Data ini berfungsi untuk menyempurnakan data primer. Dalam penelitian ini data sekunder

diperoleh melalui berbagai literatur jurnal, artikel, berita, *website* resmi pemerintah Desa Lerep, *website* resmi kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan pengembangan Desa Wisata Lerep.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2020) pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai sumber, cara dan *setting*. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

1. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari aktor yang terlibat atau pihak-pihak yang berkontribusi dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata, seperti pengelola wisata, perangkat desa, masyarakat lokal, dan wisatawan. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman mengenai penerapan prinsip kepariwisataan yang baik, serta peran dan sistem pengelolaan di desa wisata lerep yang berhasil membawa perkembangan desa wisata.

2. Observasi Partisipatif

Peneliti melakukan kegiatan observasi langsung dalam kegiatan pengelolaan Desa Wisata Lerep. Observasi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana komponen wisata (atraksi, aksesibilitas, amenitas, pelayanan tambahan) dikelola. Serta mengidentifikasi pengembangan desa wisata lerep melalui tercapainya komponen *best*

practice (dampak, kemitraan, keberlanjutan, kepemimpinan, dan transfer ke daerah lain).

3. Dokumentasi

Peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait pengelolaan dan pengembangan desa wisata Lerep, seperti laporan keuangan, peraturan desa, kebijakan yang mendukung pengelolaan desa wisata, serta data statistik mengenai jumlah wisatawan dan pendapatan desa, serta berbagai data lainnya untuk memperkuat data hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti.

1.8.7 Analisis Dan Interpretasi Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Analisis tersebut dilakukan dengan mengaitkan fakta dan data yang diperoleh selama proses pengumpulan data dengan informasi yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian. Menurut Miles Huberman dan Saldana (2014:31-33) tahapan analisis data terdiri dari:

1. Kondensasi data merupakan proses memilih data dalam untuk menentukan konsep, kategori, serta tema tertentu. Kondensasi data termasuk menyederhanakan, dan memfokuskan data yang berasal dari temuan empiris di lapangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian mengenai pengelolaan desa wisata
2. Penyajian data merupakan proses menampilkan data atau informasi secara terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun

kesimpulan dan pengambilan keputusan. Data dapat disajikan melalui uraian naratif, bagan, ataupun gambaran hubungan fenomena satu dengan fenomena lainnya.

3. Penarikan kesimpulan merupakan proses validasi yang dilakukan mulai dari awal penelitian sampai akhir penelitian dilakukan, setelah proses pengumpulan data dan penyampaian data dilakukan, untuk nantinya digunakan untuk menyelesaikan rumusan permasalahan yang ada, sebagai proses menghasilkan temuan baru dalam penelitian.

1.8.8 Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian digunakan sebagai bentuk pengujian atau memvalidasi data yang diperoleh dengan data sesungguhnya terjadi di lapangan atau lokasi penelitian. Kualitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, Menurut Sugiyono (2015) membagi tiga jenis triangulasi data yaitu:

1. Triangulasi sumber merupakan kegiatan untuk memastikan keabsahan data, melalui verifikasi informasi yang telah didapatkan melalui berbagai sumber lainnya.
2. Triangulasi teknis merupakan cara memvalidasi data melalui perbandingan informasi dari sumber yang sama, menggunakan pendekatan atau teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu merupakan teknik menguji keabsahan data dengan membandingkan informasi yang didapatkan dari narasumber yang sama, tetapi dalam waktu yang berbeda.

Berdasarkan jenis jenis triangulasi data diatas, penelitian ini menggunakan menguji validitas data menggunakan triangulasi sumber. Melalui triangulasi sumber, peneliti melakukan pengecekan data pengembangan desa wisata Lerep, dari satu narasumber dengan data narasumber lainnya dari hasil dokumentasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Hasil dari pengecekan data yang telah dilakukan kemudian diuraikan oleh peneliti, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.